



Salinan ini telah
disahkan melalui
tanda tangan digital

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

PEDOMAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 04 TAHUN 2018
TENTANG
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip merupakan salah satu elemen pokok yang harus dipenuhi dalam pengelolaan Arsip dinamis pada setiap lembaga negara sebagai pencipta Arsip termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya dalam Pasal 40 ayat (4) yang mengatur bahwa “untuk mendukung pengelolaan Arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta Arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi Arsip, jadwal retensi Arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip.”

Sebagai suatu sub sistem di dalam sistem kearsipan, sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip terintegrasi dengan subsistem klasifikasi Arsip, dan jadwal retensi Arsip. Kenyataan di lapangan, masing-masing subsistem tersebut sering berdiri sendiri baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaannya. Akibatnya pengelolaan Arsip dinamis pencipta Arsip tidak dapat terlaksana secara efisien dan efektif sebagaimana yang diharapkan. Di sisi lain, Arsip dinamis juga belum dapat dikelola dalam manajemen organisasi secara maksimal.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengubah paradigma bangsa Indonesia, yang semula informasi Arsip dinamis prinsipnya tertutup untuk publik menjadi terbuka selain informasi yang dikecualikan atau tertutup. Undang-undang ini

mewajibkan semua badan publik sebagai pencipta Arsip untuk menyediakan informasi yang dimilikinya kepada publik apabila diminta.

Mengingat pentingnya layanan informasi bagi publik, maka perlu diatur jenis-jenis informasi Arsip dari aspek pengamanan dan kewenangan untuk mengakses Arsip. Melalui Pedoman Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan layanan informasi Arsip bagi publik dapat terlaksana secara benar dan efektif

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang KeArsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang KeArsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103).

9. Peraturan Kepala ANRI Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk :

- a. mendorong unit kerja agar memberkaskan Arsip dinamisnya secara tertib yang disertai dengan daftar Arsip aktifnya;
- b. memberikan pedoman kepada unit kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi keamanan Arsip yang telah ditetapkan;
- c. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
- d. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

2. Tujuan

Tujuan Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu:

- a. menjadi acuan teknis dalam pengelolaan Arsip dinamis di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- b. tersedianya informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik;
- c. terjaminnya keamanan Arsip bagi informasi yang dikecualikan;
- d. terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika;

D. Definisi

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi

- politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
 3. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
 4. Pengelola Arsip adalah Arsiparis di Bagian Arsip dan Penata Arsip di *Central File* Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 5. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
 6. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
 7. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
 8. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
 9. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
 10. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
 11. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
 12. Daftar Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip adalah daftar yang memuat kategori kerahasiaan informasi Arsip dan kategori pembatasan akses arsip.
 13. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.

14. Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
15. Biasa/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
16. Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
17. Pengguna Internal adalah orang yang menggunakan Arsip yang berasal dari lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
18. Pengguna Eksternal adalah orang yang menggunakan Arsip yang berasal dari luar Kementerian Komunikasi dan Informatika;

E. Azas

Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan menerapkan azas gabungan yaitu:

1. Sentralisasi dalam penetapan kebijakan klasifikasi dan akses Arsip dinamis di Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta *standar operating prosedur* atau prosedur tetap, SDM, sarana dan prasarana; dan
2. Desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan dilaksanakan di masing-masing satuan kerja

BAB II

PENGELOLAAN KEAMANAN ARSIP

A. Pengorganisasian

Pengorganisasian klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Arsip yang tercipta di Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat diklasifikasikan menjadi informasi Biasa, informasi Terbatas, dan informasi Rahasia.
2. Ketiga Klasifikasi tersebut berbeda dalam teknis Pengamanan Arsipnya. Semakin tinggi tingkat Klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
3. Ketiga Klasifikasi tersebut berbeda dalam pengaturan aksesnya. Semakin tinggi tingkat Klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
4. Setiap pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya dapat mengakses Arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
5. Publik dapat mengakses informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dikategorikan Terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

B. Sumber Daya Manusia

Pengelola Arsip yang bertugas mengelola Arsip harus pegawai yang profesional baik dalam substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas. Pengelola Arsip tersebut harus ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

BAB III

KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

A. Klasifikasi Keamanan Arsip

Kerahasiaan/ketertutupan dan keterbukaan Arsip berkaitan dengan hak dan kewenangan seseorang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh informasi. Bersamaan dengan itu, kerahasiaan/ketertutupan dan keterbukaan Arsip menyangkut kewajiban suatu pihak untuk merahasiakan informasi tertentu kepada orang yang tidak berhak. Berdasarkan hal tersebut, Arsip Dinamis Kementerian Komunikasi dan Informatika terbagi menjadi beberapa Klasifikasi yaitu:

1. Biasa/Umum/Terbuka

Arsip Dinamis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang termasuk ke dalam kategori Arsip umum merupakan Arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika seperti:

- a. Arsip Dinamis dari lingkungan Sekretariat Jenderal antara lain Biro Perencanaan, Biro Umum, Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Keuangan, Biro Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, Pusat Data dan Sarana Informatika, dan Pusat Kelembagaan Internasional;
- b. Arsip Dinamis dari lingkungan Direktorat Jenderal antara lain Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, dan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Arsip Dinamis dari lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan/atau
- d. Arsip Dinamis dari lingkungan Inspektorat Jenderal.

2. Terbatas

Arsip Dinamis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang termasuk ke dalam kategori Arsip Terbatas merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Adapun Arsip Terbatas yaitu:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bidang kepegawaian seperti *personal file*, hasil pertimbangan

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan rekam medis pegawai;

- b. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bidang perlengkapan seperti dokumen instalasi air bersih, dokumen instalasi kabel, dan/atau dokumen denah ruang bangun Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- c. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat Jenderal seperti laporan hasil pemeriksaan audit internal dan eksternal;
- d. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bidang keuangan seperti daftar gaji pegawai, berkas pengelolaan anggaran di setiap unit kerja; dan/atau
- e. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bidang Arsip seperti daftar Arsip vital dan daftar Arsip terjaga.

3. Rahasia

Arsip Dinamis yang tergolong ke dalam kategori Rahasia mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika seperti:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta dari Biro Hukum atau Biro Kepegawaian seperti kasus/sengketa hukum, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan *personal file*;
- b. Arsip Dinamis yang tercipta dari Biro Umum seperti sertifikat tanah, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, dan daftar Arsip vital; dan/atau
- c. Arsip Dinamis yang tercipta dari Pusat Jasa Kearsipan seperti strategi pemasaran.

Penentuan klasifikasi keamanan Arsip mengacu pada daftar Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Menteri ini.

B. Pengamanan Fisik dan Informasi Arsip

1. Pengamanan Ruang Simpan Arsip

Pengamanan ruang simpan Arsip secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (*cctv*), kunci pengamanan ruangan, dan media simpan Arsip.

Sarana penyimpanan Arsip sebagai berikut:

a. Arsip konvensional berupa:

- 1) rak statis untuk Arsip Biasa;
- 2) filing cabinet untuk Arsip Terbatas,
- 3) dan brankas atau almari besi untuk Arsip Rahasia.

b. untuk Arsip elektronik perlu memperhatikan kualitas dan tingkat keamanan *hardware* yang diadakan.

c. Prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkatan klasifikasi informasi.

2. Penentuan Pengelola Arsip

Pengelola Arsip yang dimaksud meliputi Arsiparis di Bagian Arsip dan Penata Arsip di *Central File* Kementerian Komunikasi dan Informatika. Arsiparis sebagai Pengelola Arsip inaktif sangat berperan dalam pengamanan Arsip di *Records Centre* (Pusat Arsip) sehingga penetapan hak akses Arsip dapat berjalan optimal. Arsiparis dan/atau penata Arsip aktif mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola Arsip di *central file*.

3. Daftar Arsip Terbatas dan Daftar Arsip Rahasia

Penciptaan daftar Arsip Terbatas dan daftar Arsip Rahasia termasuk ke dalam pengamanan informasi Arsip. Tujuannya sebagai acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *Records Centre* dan *Central File*.

BAB IV KLASIFIKASI AKSES ARSIP

Berdasarkan Klasifikasi keamanan Arsip yang telah diatur dalam bab sebelumnya, dapat ditentukan hak akses bagi pengguna yang berhak untuk mengakses Arsip Dinamis. Pengguna yang diberikan hak akses, terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu Pengguna Internal yang ada di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Pengguna Eksternal di luar Kementerian Komunikasi dan informatika. Penggolongan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pengguna yang berhak di lingkungan internal instansi

1. Penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menteri Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada dibawah kewenangannya;
 - b. Pejabat Pimpinan Tingkat Tinggi Madya mempunyai kewenangan untuk mengakses Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada Menteri Komunikasi dan Informatika dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin.
 - c. Pejabat Pimpinan Tingkat Tinggi Pratama dan Administrator mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada Menteri Komunikasi dan Informatika, Pejabat Pimpinan Tingkat Tinggi Madya, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
2. Pengawas, Arsiparis, dan pelaksana yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat Klasifikasi Biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan tingkat Klasifikasi Terbatas, Rahasia, dan sangat Rahasia yang terdapat pada Menteri Komunikasi dan Informatika, Pejabat Pimpinan Tingkat Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tingkat Tinggi Pratama, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.

3. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

B. Pengguna Eksternal di luar Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berhak mengakses arsip

1. Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip dengan kategori Biasa/Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).
3. Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum-

Penentuan Klasifikasi Akses Arsip mengacu pada daftar Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Menteri ini.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika ini dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pengelolaan arsip dinamis dan digunakan sebagai dasar untuk melindungi informasi dari akses oleh pihak yang berhak.

Jakarta, 26 April 2018

a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

FARIDA DWI CAHYARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kepala Biro Hukum,



Bertiana Sari

**DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

I. FASILITATIF

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	PR	PERENCANAAN					
	PR.01	Rencana dan Program					
	PR.01.01	Rencana Strategis Kementerian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Perencanaan
	PR.01.02	Rencana Kerja Kementerian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Perencanaan
	PR.01.03	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Perencanaan
	PR.02	Penyusunan Anggaran					
	PR.02.01	Penyusunan RKA-K/L Kementerian	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	Kewenangan Pimpinan	Biro Perencanaan
	PR.02.02	Penyusunan Revisi RKA-K/L	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	Kewenangan Pimpinan	Biro Perencanaan
	PR.03	Kerjasama Lintas Sektoral dan Daerah					
	PR.03.01	Penyusunan Program Kerjasama Lintas Sektoral	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Perencanaan
	PR.03.02	Penyusunan Program Kerjasama Lintas Daerah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Perencanaan
	PR.04	Evaluasi dan Pelaporan					
	PR.04.01	Kinerja Kementerian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Perencanaan
	PR.04.02	LAKIP Kementerian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Perencanaan
	PR.04.03	LAPTAH Kementerian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Perencanaan
	PR.04.04	Laporan monitoring dan Evaluasi PP.39 Tahun 2006	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	Kewenangan ada di Bappenas	Biro Perencanaan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PR.04.05	Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kantor Staf Presiden (KSP)	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	Kewenangan ada di Bappenas	Biro Perencanaan
	PR.04.06	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	Kewenangan ada di Bappenas	Biro Perencanaan
	PR.04.07	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja (PK)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Perencanaan
	PR.04.08	Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	Kewenangan ada di Bappenas	Biro Perencanaan
	PR.04.09	Penyusunan Bahan DPR/DPD	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	Kewenangan ada di DPR RI	Biro Perencanaan
	PR.04.10	Penyusunan Bahan Sidang Kabinet	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	Kewenangan ada di Setneg. RI	Biro Perencanaan
	PR.04.11	Penyusunan Bahan Rapim/Rakorses	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	Informasi bersifat internal	Biro Perencanaan
2.	KP	KEPEGAWAIAN					
	KP.01	Tata Usaha Kepegawaian					
	KP.01.01	Data Perorangan/ DRH	Rahasia	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.01.02	Database/Statistik	Terbatas	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.01.03	NIP/ Kartu Pegawai/ Kartu PPNS	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.01.04	KGB / Tunjangan Kinerja	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Kepegawaian & Organisasi, Biro Keuangan
	KP.01.05	Pendaftaran/ Keluarga/ Perkawinan/ Anak	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.01.06	Penugasan / Penunjukan/ Surat Perintah / Pemanggilan / PLH / PLT / Surat Pernyataan/ Surat Keterangan / SPMT / SPMJ / SPP	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Kepegawaian & Organisasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KP.01.07	Penghargaan/Sertifikat/ Piala/ Piagam/ Tanda Kehormatan	Terbatas	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.01.08	Sumpah Pegawai	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.01.09	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.01.10	Cuti	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.01.11	Izin Kerja / Izin Belajar / Izin Dispensasi / Izin Penelitian PKL / Izin PKL / Tugas Belajar	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.02	Perencanaan Pegawai					
	KP.02.01	Analisis Jabatan / Analisis Beban Kerja / Evaluasi Jabatan / Kelas Jabatan / Peta Jabatan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.02.02	Formasi Pegawai / e-Formasi Pegawai	Terbatas	Eselon III	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.03	Pengadaan Pegawai					
	KP.03.01	Seleksi Pegawai / Penempatan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.03.02	Pengangkatan dan Pengunduran diri PNS / CPNS	Terbatas	Eselon III	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.03.03	Non PNS	Terbatas	Eselon III	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KP.04	Mutasi Pegawai					
	KP.04.01	Pemindahan PNS Antar Unit	Terbatas	Eselon III	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.04.02	Pemindahan PNS Antar Instansi	Terbatas	Eselon II	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.04.03	Pemindahan PNS Dengan Status Dipekerjakan/ Diperbantukan	Terbatas	Eselon III	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.04.04	Kenaikan Pangkat Struktural dan Fungsional	Terbatas	Eselon III	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.04.05	Peninjauan Masa Jabatan/Masa Kerja	Terbatas	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.04.06	Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural	Terbatas	Eselon III	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.04.07	Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian, dan Pembebasan Sementara dalam Jabatan Fungsional	Terbatas	Eselon III	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.04.08	Impassing/ Mutasi Jabatan	Terbatas	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.04.09	Baperjakat / Pelantikan /Serah Terima Jabatan	Terbatas	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.05	Pembinaan Karir Pegawai					
	KP.05.01	Analisis Kebutuhan Diklat (Perencanaan & Monev)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.05.02	Pembinaan Mental Pegawai	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KP.06	Penilaian Pegawai					
	KP.06.01	Assesment Pegawai / Kompetensi / Seleksi Jabatan	Rahasia	Eselon III	Tertutup	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.06.02	Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah	Terbatas	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.06.03	Disiplin / Teguran / Peringatan / Penundaan Gaji dan Pangkat / Penurunan Pangkat / Skorsing / Hukuman Jabatan	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.06.04	Rehabilitasi/ Permohonan Kerja Kembali	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.06.05	Absensi / Jam Kerja	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.06.06	SKP / DP3	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.06.07	Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terbatas	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.07	Kesejahteraan Pegawai					
	KP.07.01	Kesehatan / Uji Kesehatan / Medical Check Up/ Klinik	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	KP.07.02	Taspen/ Askes/ BPJS/ Bapertarum/Kartu Pegawai/ Kartu Istri/Kartu Suami	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.07.03	Olahraga/ Kesenian dan Budaya	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KP.08	Pemberhentian dan Pensiun					
	KP.08.01	Pemberhentian Dengan Hormat / Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) / Batas Usia Pensiun (BUP)	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.08.02	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.08.03	Pensiun Janda / Duda / Anak / Tewas	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	KP.09	Perkumpulan Pegawai/ Non-Pegawai					
	KP.09.01	KORPRI	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	KP.09.02	Dharma Wanita	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	KP.09.03	Koperasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	KP.09.04	Organisasi Lainnya	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian dan Organisasi
3.	OT	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA					
	OT.01	Organisasi					
	OT.01.01	Struktur Organisasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	OT.01.02	Evaluasi Organisasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	OT.01.03	Penataan Organisasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	OT.01.04	Monitoring Organisasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	OT.02	Tata Laksana					
	OT.02.01	Proses Bisnis	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	OT.02.02	<i>Standar Operational Procedur (SOP)</i>	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	OT.02.03	Budaya Organisasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	OT.02.04	<i>International Organization for Standardization (ISO)</i>	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	OT.03	Reformasi Birokrasi					
	OT.03.01	Implementasi RB	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
	OT.03.02	Monitoring dan Evaluasi RB	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Kepegawaian & Organisasi
4.	KU	KEUANGAN					
	KU.01	Anggaran					Biro Keuangan
	KU.01.01	RAPBN/ APBN (Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian, Rencana Kerja Anggaran Kementerian, Rencana Anggaran Belanja, Rencana Penyerapan Anggaran, Rencana Penarikan Dana)	Terbatas	Eselon II	Tertutup	-	Biro Keuangan
	KU.01.02	DIPA (Rincian RKA-KL, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Pergeseran/ Perubahan/ Revisi DIPA / POK DIPA, APBN, Pagu DIPA, Pagu Minus, Penyerapan/Realisasi Anggaran, UP, TUP, Dispensasi, Penyelesaian Tagihan, Penyelesaian Uang Muka, dan Pengembalian SPM)	Terbatas	Eselon II	Tertutup	-	Biro Keuangan
	KU.01.03	ABT (Anggaran Belanja Tambahan)	Terbatas	Eselon III	Tertutup	-	Biro Keuangan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KU.01.04	Berita Acara / Berita Acara Serah Terima	Terbatas	Eselon III	Tertutup	-	Biro Keuangan
	KU.01.05	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Keuangan
	KU.01.06	SPP/ Surat Permintaan Pembayaran (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Lain-lain)	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Keuangan
	KU.01.07	SPM / Surat Perintah Membayar (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Lain-lain)	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Keuangan
	KU.01.08	SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Keuangan
	KU.01.09	Laporan Keuangan / Rekonsiliasi / Neraca (Triwulan, Semester, Tahunan)	Terbatas	Eselon IV	Terbuka	Setelah di audit	Biro Keuangan
	KU.01.10	Daftar Uang Makan/ Uang Lembur/ Honorarium/ Tunjangan Kinerja	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan
	KU.01.11	Tanda Bukti Perjanjian (Bukti Pembelian, Kuitansi, SPK, Surat Perjanjian dan Surat Tagihan)	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Keuangan
	KU.01.12	Dana Operasional Menteri (DOM)	Terbatas	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan
	KU.01.13	SP3 (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan)	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Keuangan
	KU.01.14	Laporan TEPR (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran)	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Keuangan
	KU.01.15	Sistim Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Keuangan
	KU.01.16	Monev Pelaksanaan Anggaran	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Keuangan
	KU.02	Bantuan dan Pinjaman Luar Negeri					
	KU.02.01	<i>Loan agreement</i> / Hibah Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Terbuka	-	Biro Keuangan
	KU.02.02	Ikhtisar Kegiatan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan
	KU.02.03	Kerangka Acuan Kerja	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan
	KU.02.04	Studi Kelayakan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Keuangan
	KU.02.05	Rincian Anggaran Biaya	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Keuangan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KU.02.06	Dokumen Kontrak	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Keuangan
	KU.02.07	Reimbursement Kepada Negara/ Badan Pemberi Bantuan	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Keuangan
	KU.02.08	SPP/ SPM	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Keuangan
	KU.02.09	Pembukaan LC (<i>Letter of Credit</i>)/ Valuta Asing/ Penerbitan/ Obligasi	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Keuangan
	KU.03	Pendapatan/ Penerimaan					
	KU.03.01	Pajak	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Keuangan
	KU.03.02	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Keuangan
	KU.03.03	Sewa Pemanfaatan Aset/ Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Keuangan
	KU.04	Perbendaharaan / Verifikasi					
	KU.04.01	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/ TGR)	Terbatas	Eselon III	Tertutup	-	Biro Keuangan
	KU.04.02	Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Keuangan
	KU.04.03	Pertanggungjawaban Keuangan - SPP - SP3 - BKU - SPM - GU - LPJ - SP2D - LS	Rahasia	Kepala Satker Selaku KPA	Terbatas	Belum di Audit KPK	Biro Keuangan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KU.05	Pengelola Keuangan					
	KU.05.01	Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Anggaran (Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Penguji, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pembantu Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Pajabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ PPHP, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, Staf KPA, Staf PPK, dan Staf Bendahara)	Terbatas	Eselon III	Terbatas	-	Biro Keuangan
5.	HK	HUKUM					
	HK.01	Peraturan Perundang-undangan Produk Kementerian/ Lembaga					
	HK.01.01	Undang-Undang Dasar	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.01.02	Ketetapan MPR	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.01.03	Undang-Undang	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.01.04	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.01.05	Peraturan Pemerintah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.01.06	Peraturan Presiden	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.01.07	Keputusan Presiden	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.01.08	Instruksi Presiden	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.01.09	Peraturan Daerah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.01.10	Keputusan/ Peraturan Lembaga / Badan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.01.11	Peraturan Lainnya	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	HK.02	Peraturan Perundang-undangan Produk Kementerian Komunikasi dan Informatika					
	HK.02.01	Peraturan Menteri	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.02.02	Keputusan Menteri	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.02.03	Instruksi Menteri	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.02.04	Keputusan Sekretaris Jenderal	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.02.05	Keputusan Inspektur Jenderal	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.02.06	Keputusan/ Peraturan Direktur Jenderal	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.02.07	Keputusan Kepala Badan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.02.08	Surat Edaran Menteri	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.02.09	Surat Edaran Eselon I	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.02.10	Pedoman	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.03	Peraturan Perundang-undangan Produk di Luar Kementerian Komunikasi dan Informatika					
	HK.03.01	Peraturan Menteri	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.03.02	Keputusan Menteri	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.03.03	Instruksi Menteri	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.03.04	Keputusan Sekretaris Jenderal	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.03.05	Keputusan Inspektur Jenderal	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.03.06	Keputusan/ Peraturan Direktur Jenderal	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.03.07	Keputusan / Peraturan Gubernur, Perda, KPU	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.03.08	Keputusan Lembaga / Badan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.03.09	Surat Edaran (Surat Edaran Menteri, Surat Edaran Eselon I)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	HK.04	Peraturan Bersama / Surat Edaran Bersama dan Kesepakatan Bersama (MoU) / Kerjasama / Perjanjian					
	HK.04.01	Luar Negeri	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.04.02	Dalam Negeri	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.05	Perdata					
	HK.05.01	Perdata Umum (Tentang Orang/ Pengaduan/ Somasi/ Sengketa/ Perlindungan Hukum)	Terbatas	Eselon III	Terbatas	-	Biro Hukum
	HK.05.02	Perdata Khusus (Niaga/Pajak)	Terbatas	Eselon III	Terbatas	-	Biro Hukum
	HK.05.03	Berkas Proses persidangan di Peradilan/ Gugatan/ Jawaban/Replik/Duplik/Kesimpulan/ Putusan	Terbatas	Eselon III	Terbatas	-	Biro Hukum
	HK.05.04	Pelaksanaan Putusan Peradilan	Terbatas	Eselon III	Terbatas	-	Biro Hukum
	HK.06	Pidana					
	HK.06.01	Pidana Umum	Rahasia	Eselon III	Terbatas	-	Biro Hukum
	HK.06.02	Pidana Khusus	Rahasia	Eselon III	Terbatas	-	Biro Hukum
	HK.06.03	Berkas Proses persidangan di Peradilan / Tuntutan / Jawaban / Saksi/ Kesimpulan / Putusan	Terbatas	Eselon III	Terbatas	-	Biro Hukum
	HK.07	Tata Usaha/ Administrasi Negara					
	HK.07.01	Banding Administrasi	Terbatas	Eselon III	Terbatas	-	Biro Hukum
	HK.07.02	Berkas Proses persidangan di Peradilan/ Gugatan/ Jawaban/Replik/Duplik/ Kesimpulan/ Putusan	Terbatas	Eselon III	Terbatas	-	Biro Hukum

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	HK.08	Judisial Reviu Perundang-Undangan					
	HK.08.01	Judisial Reviu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.08.02	Judisial Reviu Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Hukum
	HK.09	Perizinan					
	HK.09.01	Pemberian / Persetujuan / Kewenangan / Rekomendasi	Rahasia	Eselon III	Terbatas	Informasi Bersifat Privasi	Biro Hukum
	HK.09.02	Penolakan	Rahasia	Eselon III	Terbatas	Informasi Bersifat Privasi	Biro Hukum
	HK.09.03	Peringatan	Rahasia	Eselon III	Terbatas	Informasi Bersifat Privasi	Biro Hukum
	HK.09.04	Pencabutan	Rahasia	Eselon III	Terbatas	Informasi Bersifat Privasi	Biro Hukum
	HK.09.05	Perpanjangan Izin	Rahasia	Eselon III	Terbatas	Informasi Bersifat Privasi	Biro Hukum
	HK.09.06	Dispensasi	Rahasia	Eselon III	Terbatas	Informasi Bersifat Privasi	Biro Hukum
	HK.10	Surat Kuasa					
	HK.08.01	Surat Kuasa Khusus	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Informasi Bersifat Privasi	Biro Hukum
	HK.08.02	Surat Kuasa dengan hak Substitusi	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Informasi Bersifat Privasi	Biro Hukum
	HK.08.03	Surat Kuasa Lainnya	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Informasi Bersifat Privasi	Biro Hukum
6.	UM	UMUM					
	UM.01	Tata Usaha					
	UM.01.01	Pendistribusian Surat	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	UM.01.02	Pengiriman Surat / Barang Tercetak dan Terekam	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	UM.01.03	Rapat Pimpinan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	UM.02	Rumah Tangga					
	UM.02.01	Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	UM.02.02	Ijin Peminjaman (Alat-alat, Ruang, Lapangan, dll)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	UM.02.03	Perumahan Dinas/ Kendaraan Dinas	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	UM.02.03	Gedung/ Perkantoran/ Gudang	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	UM.02.04	Pakaian Dinas	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	UM.02.05	Listrik/ PAM/ Telpon/ AC/ Lift, dll	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	UM.02.06	Sumbangan / Bantuan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	UM.03	Kearsipan					
	UM.03.01	Pembinaan Kearsipan	Terbatas	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	UM.03.02	Penyusunan Sistem Kearsipan	Terbatas	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	UM.03.03	Pemindahan	Terbatas	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	UM.03.04	Pemusnahan	Terbatas	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	UM.03.05	Penyerahan	Terbatas	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	UM.03.06	Pemeliharaan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	UM.03.07	Berkas Proses Alih Media Arsip / Arsip Elektronik	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	UM.03.08	Berita Acara - Berita Acara Penyerahan - Berita Acara Pemindahan - Berita Acara Pemusnahan	Terbatas	Eselon III	Terbuka	-	Biro Umum
	UM.03.09	Layanan Kearsipan (Peminjaman dan Penggunaan Arsip)	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	Biro Umum
	UM.03.10	Audit Kearsipan (Eksternal dan Internal)	Terbatas	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
7.	PL	PERLENGKAPAN					
	PL.01	Penggunaan Barang Milik Negara					
	PL.01.01	Alih status penggunaan Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	PL.01.02	Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	PL.01.03	Penggunaan sementara Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	PL.01.04	Laporan Penggunaan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Umum
	PL.02	Pemanfaatan Barang Milik Negara					
	PL.02.01	Sewa Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	PL.02.02	Pinjam pakai Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	PL.02.03	Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	PL.02.04	Bangun guna Serah/Bangun Serah Guna	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	PL.02.05	Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	PL.02.06	Laporan Pemanfaatan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Umum
	PL.03	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara					
	PL.03.01	Sertifikasi / Penyimpanan / Pergudangan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Umum
	PL.03.02	Pemeliharaan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Umum
	PL.03.03	Laporan Pengamanan dan/atau Pemeliharaan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Umum

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PL.04	Pemindahtanganan Barang Milik Negara					
	PL.04.01	Penjualan Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	PL.04.02	Tukar menukar Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	PL.04.03	Hibah Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	PL.04.04	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	PL.04.05	Laporan Pemindahtanganan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Umum
	PL.05	Penghapusan Barang Milik Negara					
	PL.05.01	Pemusnahan Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	PL.05.02	Penghapusan Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	PL.05.03	Laporan Penghapusan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Umum
	PL.06	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Negara					
	PL.06.01	Inventarisasi Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	PL.06.02	Tukar menukar Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	PL.06.03	Penilaian Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	PL.06.04	Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Umum
	PL.06.05	Pencatatan Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	PL.06.06	Laporan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Umum
	PL.06.07	Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PL.07	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara					
	PL.07.01	Pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	PL.07.02	Pemantauan dan Penertiban Barang Milik Negara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	PL.07.03	Laporan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Umum
	PL.07.04	Laporan Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	-	Biro Umum
8.	UP	UNIT PENGADAAN					
	UP.01	Pengadaan					
	UP.01.01	Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	UP.01.02	Rekanan / Penawaran / Proposal / Brosur	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	UP.01.03	Swakelola	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	UP.01.04	Penyedia	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	Biro Umum
	UP.01.05	Monev	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
	UP.01.06	Pembinaan Barang dan Jasa	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Umum
9.	HM	INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT					
	HM.01	Pelayanan Media Online					
	HM.01.01	Layanan Permohonan Informasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.01.02	Layanan Keberatan Informasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.01.03	Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	HM.01.04	Monitoring Layanan Informasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.01.05	Laporan Layanan Informasi (Bulanan dan Tahunan)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.01.06	Layanan Informasi Media Call Center	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.02	Pelayanan Media Konvensional (Pameran)					
	HM.02.01	Layanan Informasi Media Tercetak	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.02.02	Layanan Informasi Media Elektronik	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.02.03	Layanan Informasi Media Langsung	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.03	Hubungan Masyarakat					
	HM.03.01	Dengar Pendapat / Hearing DPR	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.03.02	Bakohumas	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.03.03	Ucapan: Terimakasih, Selamat, dll	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.03.04	Hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan : KIM	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.03.05	Hubungan dengan Komunikasi Internal	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.03.06	Hubungan Komunikasi Eksternal ; Dialog Interaktif TV, Radio, dan SMS Blast	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.04	Keprotokolan					
	HM.04.01	Upacara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.04.02	Acara Kedinasan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.04.03	Kunjungan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.04.04	Agenda Pimpinan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.05	Publikasi					
	HM.05.01	Liputan / Pemberitaan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.05.02	Jumpa Pers	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.05.03	Wawancara	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	HM.05.04	Kliping	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.05.05	Majalah / Tabloid / Jurnal / Booklet / Leaflet	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.05.06	Press Release	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.05.07	Advetorial	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.05.08	Televisi / Radio	Biasa	Eselon IV	Terbuka		
	HM.06	Dokumentasi					
	HM.06.01	Foto	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.06.02	Cetak	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.06.03	Audio Visual	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.06.04	Audio Video	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.07	Perpustakaan					
	HM.07.01	Layanan Pustaka	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.07.02	Pengelolaan Pustaka	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
	HM.07.03	Pengadaan Bahan Pustaka	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Biro Humas
10.	PW	PENGAWASAN					
	PW.01	PROGRAM					
	PW.01.01	Program Audit Kinerja - Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan (APBN) - Audit Kinerja atas Pelaksanaan Program - Audit Kinerja atas Kegiatan Pelayanan Publik a. Layanan ISR (Izin Siaran Radio) b. Layanan IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) c. Layanan di Bidang Pendidikan STMM Yogyakarta	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PW.01.02	Program Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Investigasi) - Masalah Kepegawaian dan Kepemimpinan - Masalah Operasional- Masalah Kasus	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
	PW.01.03	Program Kegiatan Monitoring - Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Satker - Monitoring Piutang PNBK - Monitoring Penempatan Perangkat Bantuan - Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan - Monitoring Gratifikasi, LHKPN, LHK-ASN, Benturan Kepentingan, Zona Integritas, Whistle Blowing System (WBS)	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
	PW.01.04	Program Kegiatan Reviu - Pengawasan Program - Reviu Laporan Keuangan Semester I Kementerian - Reviu Laporan Keuangan Semester II Kementerian - Reviu CaLK & CaLK BMN - Reviu Laporan Keuangan Semester I Satker/UPT - Reviu Laporan Keuangan Semester II Satker/UPT	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
	PW.01.05	Program Kegiatan Evaluasi - Evaluasi LAKIP Eselon I, II, dan Kementerian - Evaluasi atas Pelaksanaan Program Bantuan Kominfo	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
	PW.01.06	Program Kegiatan Pengawasan Lainnya					
		- Asistensi	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
		- Konsultasi	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
		- Penanganan Pengaduan	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
		- Kegiatan Anti Korupsi	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbuka	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
		- Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
	PW.02	PELAKSANAAN					Inspektorat Jenderal
	PW.02.01	Audit Kinerja - Audit kinerja atas Pengelolaan Keuangan (APBN) - Audit Kinerja atas Pelaksanaan Program - Audit Kinerja atas Kegiatan Pelayanan Publik	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
	PW.02.02	Audit Investigasi	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
	PW.02.03	Monitoring - Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Satker - Monitoring Piutang PNBPN - Monitoring Penempatan Perangkat Bantuan - Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan - Monitoring Gratifikasi, LHKPN, LHK-ASN, Benturan Kepentingan, Zona Integritas, Whistle Blowing System (WBS)	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PW.02.04	Pelaksanaan Reviu - Pengawasan Program - Reviu Laporan Keuangan Semester I Kementerian - Reviu Laporan Keuangan Semester II Kementerian - Reviu CaLK & CaLK BMN - Reviu Laporan Keuangan Semester I Satker/UPT - Reviu Laporan Keuangan Semester II Satker/UPT	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
	PW.02.05	Pelaksanaan Evaluasi - Evaluasi LAKIP Eselon I, II, dan Kementerian - Evaluasi atas Pelaksanaan Program Bantuan Kominfo	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
	PW.02.06	Pengawasan Lainnya					
		- Asistensi	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
		- Konsultasi	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
		- Penanganan Pengaduan	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
		- Kegiatan Anti Korupsi	Biasa	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbuka	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
		- Pembinaan JFA	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
	PW.03	PELAPORAN					
	PW.03.01	Gratifikasi	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
	PW.03.02	LHKPN / LHK-ASN	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
	PW.03.03	Benturan Kepentingan	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PW.03.04	Zona Integritas	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
	PW.03.05	Whistle Blowing System (WBS)	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
	PW.04	PELAPORAN AUDIT					
	PW.04.01	Laporan Hasil Audit - Laporan Hasil Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan (APBN) - Laporan Hasil Audit Kinerja atas Pelaksanaan Program - Laporan Hasil Audit Kinerja atas Kegiatan Pelayanan Publik	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
	PW.04.02	Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (Audit Investigasi)	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
	PW.04.03	Laporan Hasil Kegiatan Monitoring - Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Satker - Monitoring Piutang PNBP - Monitoring Penempatan Perangkat Bantuan - Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan - Monitoring Gratifikasi, LHKPN, LHK-ASN, Benturan Kepentingan, Zona Integritas, Whistle Blowing, System (WBS)	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
	PW.04.04	Laporan Hasil Kegiatan Reviu- Pengawasan Program- Reviu Laporan Keuangan Semester I Kementerian- Reviu Laporan Keuangan Semester II Kementerian- Reviu CaLK & CaLK BMN- Reviu Laporan Keuangan Semester I Satker/UPT- Reviu Laporan Keuangan Semester II Satker/UPT	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PW.04.05	Laporan Hasil Kegiatan Evaluasi - Evaluasi LAKIP Eselon I, II, dan Kementerian - Evaluasi atas Pelaksanaan Program Bantuan Kominfo	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
	PW.04.06	Laporan Hasil Pengawasan Lainnya					
		- Asistensi	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
		- Konsultasi	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
		- Penanganan Pengaduan	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
		- Kegiatan Anti Korupsi	Biasa	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbuka	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
		- Pembinaan JFA	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
	PW.05	TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN					
	PW.05.01	Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal - Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja - Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (Investigasi)	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
	PW.05.02	Tindak Lanjut Pemeriksaan eksternal	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal
	PW.05.03	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Terbatas	Eselon IV dan Pejabat terkait	Terbatas	Sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya	Inspektorat Jenderal

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
11.	LT	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM					
	LT.01	Penelitian Komunikasi dan Informatika					
	LT.01.01	Administrasi Penelitian - surat menyurat penelitian - penyebaran kuisisioner - Perjanjian kerjasama joint riset dengan Lembaga/ Perguruan Tinggi - Administrasi Kegiatan Temu ilmiah peneliti - Laporan Kegiatan Temu Ilmiah peneliti	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Puslitbang SDPPPI, Puslitbang Aptika dan IKP dan UPT BPPKI/BBPPKI
	LT.01.02	Pengolahan/Pengumpulan data Penelitian - pelaksanaan survey - wawancara - pengumpulan kuisisioner - data hasil wawancara/survey/ FGD - data olah statistik - data hasil statistik	Biasa	Peneliti/ Eselon IV	Terbuka	-	Puslitbang SDPPPI, Puslitbang Aptika dan IKP dan UPT BPPKI/BBPPKI
LT.01.03	FGD / Seminar Penelitian - riset desain penelitian - proposal penelitian - bahan paparan - kuisisioner pra penelitian - kuisisioner penelitian - Bahan Seminar awal - Bahan Seminar lanjutan - Bahan Seminar hasil	Biasa	Peneliti/ eselon IV	Terbuka	-	Puslitbang PPI, Puslitbang Aptika dan IKP, Puslitbang SDPPPI dan UPT BPPKI/BBPPKI	

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	LT.01.04	Laporan Akhir/Hasil Penelitian - draft laporan akhir - Laporan hasil Penelitian - Bahan Penelitian yang sudah dipresentasikan - Executive summary - Publikasi hasil Penelitian	Biasa	Peneliti / Eselon IV	Terbuka	-	Puslitbang PPI, Puslitbang Aptika dan IKP, Puslitbang SDPPI dan UPT BPPKI/BBPPKI
	LT.01.05	Penjaminan Mutu dan Pendayagunaan Hasil Penelitian	Biasa	Peneliti/ eselon IV	Terbuka	-	Puslitbang PPI, Puslitbang Aptika dan IKP, Puslitbang SDPPI dan UPT BPPKI/BBPPKI
	LT.02	Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika					
	LT. 02.01	Penyusunan Bidang Teknis Standarisasi Kompetensi, Pengembangan Profesi dan Pengembangan Sistem Sertifikasi Kominfo - Administrasi, laporan, dan evaluasi	Biasa	eselon IV	Terbuka	-	Pusbang Literasi dan Profesi SDM Komunikasi
	LT.02.02	Pelaksanaan Standarisasi Kompetensi, Pengembangan Profesi dan Pengembangan Sistem Sertifikasi Kominfo, Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi SKKNI - administrasi - laporan	Biasa	eselon IV	terbuka	-	Pusbang Literasi dan Profesi SDM Komunikasi, Pusbang Literasi dan Profesi Informatika

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	LT.02.03	<p>Program Beasiswa S2/S3 Dalam Negeri dan Luar Negeri :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi jurusan komunikasi (undangan, sosialisasi, laporan, seleksi, pengumuman, surat penerimaan beasiswa, surat pengembalian, briefing awal, kerjasama, ijin keberangkatan, financial statement) - Administrasi jurusan informatika (undangan, sosialisasi, laporan, seleksi, pengumuman, surat penerimaan beasiswa, surat pengembalian, briefing awal, kerjasama, ijin keberangkatan, financial statement) 	Biasa	eselon IV	terbuka	-	Pusbang Literasi dan Profesi SDM Komunikasi, Pusbang Literasi dan Profesi Informatika
	LT.03	Sekolah Tinggi Multi Media					
	LT.03.01	<p>Penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi umum: (penerimaan mahasiswa, simulasi, surat MOU, kerjasama pendidikan, sertifikat, sosialisasi / promosi) - Administrasi mahasiswa: (surat keterangan mahasiswa, kolaborasi jurusan/simulasi, wisuda, akreditasi, kemahasiswaan/non akademik, BEM, UKM dll) - Jurusan Penyiaran : (teori, praktek, pembimbingan akademik/skripsi/TA, kerja praktek) - Jurusan Animasi dan desain Teknologi Permainan: (teori, praktek, pembimbingan akademik/skripsi/TA, kerja praktek) - Jurusan Komunikasi Informasi Publik: (teori, praktek, pembimbingan akademik/skripsi, KKL, KKN) 	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	STMM Yogyakarta

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	LT.03.02	Penelitian : (administrasi, laporan, evaluasi)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	STMM Yogyakarta
	LT.03.03	Pengabdian Masyarakat/Kerjasama (Administrasi, laporan, evaluasi)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	STMM Yogyakarta
	LT.03.03	Pengabdian Masyarakat/Kerjasama (Administrasi, laporan, evaluasi)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	STMM Yogyakarta
	LT.03.04	Ujian Kompetensi / Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) : - Unit Kompetensi Pelaksanaan Audio Visual (administrasi, laporan, evaluasi) - Unit Kompetensi Penulisan Naskah (administrasi, laporan, evaluasi) - Unit Kompetensi Master of Ceremony (administrasi, laporan, evaluasi) - Unit kompetensi Pengoperasian Piranti Lunak (administrasi, laporan, evaluasi) - Unit Kompetensi Penyunting Audio Video (administrasi, laporan, evaluasi) - Unit Kompetensi Pembuatan 3D Model Digital (administrasi, laporan, evaluasi)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	STMM Yogyakarta
12.	DL	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					Pusdiklat
	DL.01	Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan					
	DL.01.01	Kurikulum, Modul, Metode, Standar / Mutu, dan Pedomam Diklat, Dokumen Akademik, Sertifikat / STTPL	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusdiklat
	DL.01.02	Program Diklat	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusdiklat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	DL.02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					
	DL.02.01	Ikatan Dinas	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusdiklat
	DL.02.02	Kerjasama dengan Instansi Pemerintah /Non Pemerintah/ Perguruan tinggi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusdiklat
	DL.02.03	Pra Jabatan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusdiklat
	DL.02.04	Penjenjangan Struktural	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusdiklat
	DL.02.05	Fungsional	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusdiklat
	DL.02.06	Teknis	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusdiklat
	DL.02.07	Bimbingan Teknis	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusdiklat
	DL.03	Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					
	DL.03.01	Evaluasi Materi Penyelenggaraan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusdiklat
	DL.03.02	Evaluasi Pengajar/Instruktur/Fasilitator	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusdiklat
	DL.03.03	Evaluasi Sarana dan Prasarana	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusdiklat
	DL.03.04	Evaluasi Kurikulum, Metode, dan Standarisasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusdiklat
	DL.03.05	Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusdiklat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
13.	DT	DATA DAN SARANA INFORMATIKA					
	DT.01	Perencanaan Strategis, Tata Kelola dan Kebijakan TI (Plan)					
	DT.01.01	Pengelolaan Tata Kelola TI	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.01.02	Pengelolaan Rencana Strategis TI	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.01.03	Pengelolaan Arsitektur TI Kementerian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.01.04	Pengelolaan Inovasi-inovasi TI	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.01.05	Pengelolaan Portolio Strategis dan Investasi TI	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.01.06	Pengelolaan SDM TI	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.01.07	Pengelolaan Hubungan Antara Stakeholder Perusahaan dengan Stakeholder TI	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.01.08	Pengelolaan Perjanjian/Kontrak Tingkat Layanan (SLA & KPI)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.01.09	Pengelolaan Pemasok Layanan TI	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.01.10	Pengelolaan Kualitas Layanan dan Solusi (ISO 9001)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.01.11	Pengelolaan Risiko TI	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.01.12	Pengelolaan Keamanan Informasi (ISO 27001)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	DT.02	Perancangan, Pembangunan, Pengembangan, Pengujian dan Penjaminan Kualitas Layanan					
	DT.02.01	Pengelolaan Program dan Proyek	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.02.02	Pengelolaan Permintaan Layanan dan Insiden Layanan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.02.03	Pengelolaan Permasalahan Layanan TI (Database permasalahan)	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.02.04	Pengelola Ketersediaan dan Kapasitas Layanan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.02.05	Pengelolaan Perubahan Organisasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.02.06	Pengelolaan Permintaan Perubahan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.02.07	Pengelolaan Permintaan Perubahan dan Transisi Penerimaan Hal yang Baru	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.02.08	Pengelolaan Pengetahuan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.02.09	Pengelolaan Semua Aset TI	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.02.10	Pengelolaan Konfigurasi Layanan	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Pusat Data dan Sarana Informatika

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	DT.03	Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengoperasian Layanan TI serta Layanan Helpdesk atau Permintaan Layanan TI					
	DT.03.01	Pengelolaan Operasional Layanan TI - hasil penilaian vulnerability assessment (VA), pentest dan insiden keamanan informasi; - topologi jaringan; - pengelolaan Data Center; - Setting parameter perangkat	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Dapat menimbulkan kerawanan dan ancaman bagi seluruh pelayanan TI Kemkominfo	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.03.02	Pengelolaan Permintaan Layanan dan Insiden Layanan	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.03.03	Pengelolaan Permasalahan Layanan TI (Database permasalahan)	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.03.04	Pengelolaan Kontinuitas/keberlangsungan Layanan	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.03.05	Pengelolaan Layanan untuk Layanan TI	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.03.06	Pengelolaan Pengontrolan Proses Bisnis (ISO 27001 : Keamanan Informasi)	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Pusat Data dan Sarana Informatika

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	DT.04	Pengelolaan Kinerja Layanan TI Atas Hasil Monitor dan Evaluasi Kinerja Layanan TI					
	DT.04.01	Monitor, Evaluasi dan Penilaian Kinerja dan Kesesuaian dengan Tujuan Pencapaian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.04.02	Monitor, Evaluasi dan Penilaian Sistem Pengontrolan Internal	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.04.03	Monitor, Evaluasi dan Penilaian Kepatuhan dengan Persyaratan Eksternal	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.05	LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)					
	DT.05.01	Administrasi LPSE	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.05.02	Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Dapat menimbulkan kerawanan dan ancaman bagi penyelenggaraan lelang yang dijamin kerahasiaan dan tidak ada kecurangan	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.05.03	Verifikasi Penyedia	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.05.04	Akun (Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan/ ULP, Penyedia, Auditor, Helpdesk)	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Dapat menimbulkan kerawanan dan ancaman bagi penyelenggaraan lelang yang dijamin kerahasiaan dan tidak ada kecurangan	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.05.05	Pelatihan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.05.06	Standard LPSE	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika
	DT.05.07	Laporan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Data dan Sarana Informatika

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
14.	KI	KELEMBAGAAN INTERNASIONAL					
	KI.01	Multilateral					
	KI.01.01	International Telecommunication Union (ITU)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.01.02	Universal Postal Union (UPU)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.01.03	World Summit On Information Society (WSIS)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.01.04	World Trade Organization (WTO)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.01.05	European Telecommunication Standardization Institute (ETSI)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.01.06	United Nation (UN)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.01.07	Organisasi Internasional Lainnya	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.02	Regional					
	KI.02.01	Asia Pasific Telecommunity (APT)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.02.02	Association of South East Asian Nation (ASEAN)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.02.03	Asia Pasific Economic Cooperation on Telecommunications (APECTEL)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.02.04	Asian Pasific Postal Union (APPU)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.02.05	Organisasi Regional Lainnya	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Kelembagaan Internasional

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KI.03	Bilateral				-	Pusat Kerjasama Internasional
	KI.03.01	Information And Communication Joint Committee (ICJC)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.03.02	Border Communication Coordination Meeting (BCCM)	Rahasia	Eselon IV	Tertutup	Informasi berupa data operator frekuensi dan spektrum	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.03.03	Joint Committee On Communication (JCC)	Rahasia	Eselon IV	Tertutup	Informasi berupa data operator frekuensi dan spektrum	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.03.04	Trilateral Meeting	Rahasia	Eselon IV	Tertutup	Informasi berupa data operator frekuensi dan spektrum	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.03.05	Brunei Indonesia Malaysia Phillipine East Asean Growth Area (BIMP-EAGA) ICT Cluster Meeting	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.03.06	Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.03.07	Sidang Komisi Bersama (SKB) Dengan Negara Mitra	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.03.08	Economic Partnership Agreement	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Informasi berupa data operator frekuensi dan spektrum	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.03.09	Expert	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.03.10	Perjanjian Internasional	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.03.11	Korean Agency	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.03.12	Japan Agency	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Kelembagaan Internasional
	KI.03.13	Kerjasama Capacity Building dengan negara mitra	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Pusat Kelembagaan Internasional

II. SUBSTANTIF

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1.	SP	SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA					
	SP.01	Penataan Sumber Daya					
	SP.01.01	Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap, Bergerak Darat	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Indonesia, dan keselamatan bangsa	Direktorat Penataan Sumber Daya
	SP.01.02	Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap, Bergerak Darat	Sangat Rahasia	Eselon III	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Indonesia, dan keselamatan bangsa	Direktorat Penataan Sumber Daya
	SP.01.03	Pengelolaan Orbit Satelit	Sangat Rahasia	Eselon III	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Indonesia, dan keselamatan bangsa	Direktorat Penataan Sumber Daya

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	SP.01.04	Ekonomi Sumber Daya	Sangat Rahasia	Eselon III	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Indonesia, dan keselamatan bangsa	Direktorat Penataan Sumber Daya
	SP.01.05	Harmonisasi Teknik Spektrum	Sangat Rahasia	Eselon III	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Indonesia, dan keselamatan bangsa	Direktorat Penataan Sumber Daya
	SP.02	Operasi Sumber Daya					
	SP.02.01	Pelayanan Spektrum Dinas Tetap	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data pribadi/perusahaan	Direktorat Operasi Sumber Daya
	SP.02.02	Pelayanan Spektrum Dinas Bergerak Darat	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data pribadi/perusahaan	Direktorat Operasi Sumber Daya

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	SP.02.03	Pelayanan Spektrum Dinas Penyiaran	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data pribadi/perusahaan	Direktorat Operasi Sumber Daya
	SP.02.04	Pelayanan Spektrum Dinas Penerbangan, Maritim dan Satelit	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data pribadi/perusahaan	Direktorat Operasi Sumber Daya
	SP.02.05	Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	Direktorat Operasi Sumber Daya
	SP.02.06	Pelayanan Operator Radio	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	Direktorat Operasi Sumber Daya
	SP.02.07	Penanganan Piutang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data pribadi/perusahaan	Direktorat Operasi Sumber Daya
	SP.02.08	Analisa dan Evaluasi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data pribadi/perusahaan	Direktorat Operasi Sumber Daya
	SP.02.09	Konsultasi dan Informasi Sumber Daya					Direktorat Operasi Sumber Daya
		- Evaluasi Lembar ISO	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	
		- laporan Konsultasi Publik dan Workshop Manajemen SDPPI	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	
		- Survey Kepuasan Pelanggan dan Key Performance Indicator	Biasa	Eselon IV	Terbatas	-	
		- Trouble Ticket Contact Center Ditjen SDPPI	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	SP.02.10	Pengelolaan Data Operasi Sumber Daya					Direktorat Operasi Sumber Daya
		- Laporan Hasil Validasi Radio UPT Ditjen SDPPI	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	
		- Laporan Hasil Observasi dan Monitoring Ditjen SDPPI	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	
						-	
	SP.03	Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika				-	
	SP.03.01	Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
	SP.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
	SP.03.03	Monitoring Dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
	SP.03.04	Monitoring Dan Penertiban Perangkat Pos Dan Informatika	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	Monitoring bersifat Internal, Penertiban Perangkat bersifat Tertutup	Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
	SP.03.05	Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	SP.04	Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika				-	
	SP.04.01	Standar Perangkat Telekomunikasi Radio	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
	SP.04.02	Standar Infrastruktur Telekomunikasi Radio	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
	SP.04.03	Standar Perangkat Pos dan Telekomunikasi Non Radio	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
	SP.04.04	Standar Infrastruktur Pos dan Telekomunikasi Non Radio	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
	SP.04.05	Standar Kualitas Layanan	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
	SP.04.06	Harmonisasi Standar Perangkat	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
	SP.04.07	Standardisasi Perangkat dan Infrastruktur Teknologi Informasi	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
	SP.04.08	Standardisasi Manajemen dan Tata Kelola Teknologi Informasi	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
	SP.04.09	Sertifikasi perangkat Pos, Telekomunikasi, dan Informatika	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	SP.04.10	Data dan Informasi Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Informatika	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
	SP.04.11	Rekomendasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
	SP.04.12	Penolakan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Hanya dapat diberikan kepada pemohon sertifikasi perangkat	Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
	SP.05	Pengujian Perangkat Telekomunikasi					
	SP.05.01	Pelayanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	BBPPT
	SP.05.02	Pelayanan / Laporan Kalibrasi Alat Ukur	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Pelayanan Terbuka, Laporan Terbatas	BBPPT
	SP.05.03	Dokumen Mutu	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Untuk Menjamin Mutu Pengujian Sesuai dengan ISO 17025; 2005	BBPPT
	SP.05.04	Audit Internal dan Eksternal Pengujian	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	BBPPT
	SP.05.05	Uji Banding Mandatory KAN	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	BBPPT
	SP.05.06	Metode Penyusunan Pengujian	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	BBPPT
	SP.05.07	Rekapitulasi Hasil Uji (RHU)	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Hanya dapat diberikan kepada pemilik perangkat tersebut	BBPPT
	SP.05.08	Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Ukur	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	BBPPT

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
2.	PI	PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA					
	PI.01	POS					
	PI.01.01	Layanan Pos Universal (LPU)	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Selama dalam proses	Direktorat Pos
		- Usulan alokasi LPU dari PT. Pos Indonesia	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	
		- Usulan alokasi LPU dari Menkominfo kepada Menkeu	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	
		- Dokumen perjanjian kerja BO LPU	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	
		- Penetapan KPA untuk kegiatan BO LPU	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	
		- Penetapan jumlah subsidi LPU	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	
		- Penetapan Kantor Pos Cabang Luar Kota (KPCLK) yang disubsidi	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	
		- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) KPA	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	
		- Surat pernyataan telah diverifikasi dari KPA	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	
		- Draft Pencairan BO LPU	Rahasia	Eselon IV	Tertutup	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	
		- Hasil verifikasi	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	
		- Laporan LPU	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	
		- Risalah rapat	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	
	PI.01.02	Layanan Pos Komersial	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Selama dalam Proses	Direktorat Pos
		- Izin Penyelenggara Pos	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	
		- Hasil Verifikasi kelengkapan dokumen permohonan izin penyelenggaraan pos	Rahasia	Eselon IV	Tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data pribadi/perusahaan	
		- Surat Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pos	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
		- Hasil verifikasi pencabutan izin penyelenggaraan pos	Rahasia	Eselon IV	Tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data pribadi/perusahaan	Direktorat Pos
		- Surat Permohonan Penghentian Operasional Penyelenggaraan Pos	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	
		- Permohonan Perubahan Data Penyelenggara Pos	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	
		- Laporan Kinerja Operasional Penyelenggara Jasa Titipan/Penyelenggara Pos	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	
		- Update Data Penyelenggara Pos	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	
		- Risalah rapat	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	
	PI.01.03	Pentarifan Pos	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	Direktorat Pos
		- Tarif LPU dan Formula Tarif LPK	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	
		- Risalah Rapat	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	
		- Laporan Pentarifan Pos	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	
		- Berita acara penarikan kontribusi	Rahasia	Eselon IV	Terbatas	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data pribadi/perusahaan	
	PI.01.04	Perangko dan Filateli					Direktorat Pos
		- Cetak coba perangko	Rahasia	Eselon IV	Tertutup	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	
		- Perangko	Terbuka	Eselon IV	Terbuka	-	

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
		- Tata persuratan lomba	Terbatas	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Pos
		- Pengumuman lomba dan pengumuman pemenang	Terbuka	Eselon IV	Terbuka	-	
		- Sampul Filateli	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	
		- Laporan kegiatan dan lomba	Terbatas	Eselon IV	Terbuka	-	
		- Hasil karya LDPN dan Lomba Menulis Surat	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	
		- Permohonan Penerbitan Prangko	Terbatas	Eselon IV	Terbuka	-	
		- Risalah Rapat	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	
	PI.01.05	Kerjasama dan Pengembangan Industri Pos	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat internal	Direktorat Pos
	PI.02	Telekomunikasi					
	PI.02.01	Jaringan Telekomunikasi					
		- Izin Prinsip Penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data pribadi/perusahaan	Dit.Telekomunikasi
		- Perpanjangan Ijin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Mengandung Informasi Perusahaan	Dit.Telekomunikasi
		- Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Mengandung Informasi Perusahaan	Dit.Telekomunikasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PI.02.02	Jasa Telekomunikasi					
		- Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data pribadi/perusahaan	Dit. Telekomunikasi
		- Perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Mengandung Informasi Perusahaan	Dit. Telekomunikasi
		- Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Mengandung Informasi Perusahaan	Dit. Telekomunikasi
	PI.02.03	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	Terbatas	Eselon III	Terbuka	Mengandung Informasi Perusahaan	Dit. Telekomunikasi
		- Penetapan Penomoran Telekomunikasi					
	PI.02.04	Tarif, Interkoneksi dan Iklim Usaha					
		- Laporan Pendapatan Usaha	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Mengandung Informasi Perusahaan	Dit. Telekomunikasi
		- Regulatory Financial Report	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Mengandung Informasi Perusahaan	Dit. Telekomunikasi
		- Retail Service Activity Cost	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Mengandung Informasi Perusahaan	Dit. Telekomunikasi
		- Dokumen Penawaran Interkoneksi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dit. Telekomunikasi
		- Laporan Sewa Jaringan	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Mengandung Informasi Perusahaan	Dit. Telekomunikasi
	PI.02.05	Telekomunikasi Khusus dan Kelayakan Penyelenggara Telekomunikasi	Terbatas	Eselon III	Tertutup	Mengandung Informasi Perusahaan	
		- Uji Laik Operasi dan berkas pendukungnya (Surat Permohonan, Surat Kelengkapan, SPT, Berita Acara)					Dit. Telekomunikasi
		- Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO)					

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PI.03	Penyiaran					
	PI.03.01	Layanan Radio					
		- Berita Acara Hasil Forum Rapat Bersama (FRB)	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Direktorat Penyiaran
		- Izin Prinsip Penyiaran (IPP) Prinsip	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Kewenangan ada di KPI	Direktorat Penyiaran
		- Perpanjangan IPP Prinsip	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Kewenangan ada di KPI	Direktorat Penyiaran
		- Hasil EUCS	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Informasi bersifat internal	Direktorat Penyiaran
		- IPP Tetap atau Penyesuaian	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Kewenangan ada di KPI	Direktorat Penyiaran
	PI.03.02	Layanan Televisi					
		- Rekomendasi Kelayakan dari KPI	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Kewenangan ada di KPI	Direktorat Penyiaran
		- Risalah Rapat (pra FRB),	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Direktorat Penyiaran
		- Berita Acara Hasil Seleksi	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Direktorat Penyiaran
		- IPP Prinsip	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Kewenangan ada di KPI	Direktorat Penyiaran
		- Perpanjangan IPP Prinsip	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Kewenangan ada di KPI	Direktorat Penyiaran
		- Hasil EUCS	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Informasi bersifat internal	Direktorat Penyiaran
		- IPP Tetap atau Penyusunan	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Kewenangan ada di KPI	Direktorat Penyiaran
	PI.03.03	Verifikasi dan Ujicoba Siaran					
		- Laporan Hasil Verifikasi Faktual Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Televisi	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Direktorat Penyiaran

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
		- Evaluasi Uji Coba Siaran - Surat Permohonan EUCS Lembaga Penyiaran - Berita Acara Hasil EUCS	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data pribadi/ perusahaan	Direktorat Penyiaran
		- Perubahan Data - Permohonan Perubahan Data Lembaga Penyiaran - Berita Acara Klarifikasi Perubahan Data Lembaga Penyiaran - Surat Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Data.	Rahasia	Eselon IV	Tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data pribadi/ perusahaan	Direktorat Penyiaran
	PI.03.04	Iklim Usaha Penyiaran dan Kelayakan Teknologi - Laporan Kegiatan Forum Dialog	Biasa	Eselon III	Terbuka	-	Direktorat Penyiaran
	PI.03.05	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penyiaran dan Sarana Pendukung Pengelolaan Data Penyiaran	Rahasia	Eselon III	Tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data pribadi/ perusahaan	Direktorat Penyiaran
	PI.04	Pengembangan Pitalebar					
	PI.04.01	Infrastruktur Telekomunikasi Pitalebar	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Menghindari Penyalahgunaan	Direktorat Pengembangan Pitalebar
	PI.04.02	Ekosistem Pitalebar	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Menghindari Penyalahgunaan	Direktorat Pengembangan Pitalebar
	PI.04.03	Infrastruktur Penyiaran Pitalebar	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Menghindari Penyalahgunaan	Direktorat Pengembangan Pitalebar
	PI.04.04	Infrastruktur Keperluan Khusus Pitalebar	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Menghindari Penyalahgunaan	Direktorat Pengembangan Pitalebar
	PI.04.05	Tata Kelola Pitalebar	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Menghindari Penyalahgunaan	Direktorat Pengembangan Pitalebar

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PI.05	Pengendalian Pos dan Informatika					
	PI.05.01	Monitoring dan Evaluasi Pos					
		- Operasional penyelenggara jasa titipan	Rahasia	Eselon I	Tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data pribadi/perusahaan	Dit. Pengendalian PPI
	PI.05.02	Monitoring dan Evaluasi Telekomunikasi Khusus dan Jaringan Telekomunikasi					
		- LKO (Laporan Kinerja Operasi) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi	Rahasia	Eselon II	Tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data perusahaan	Dit. Pengendalian PPI
		- Laporan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri)	Rahasia	Eselon I	Tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data perusahaan	Dit. Pengendalian PPI
		- Laporan 5 tahunan penyelenggara jaringan telekomunikasi	Rahasia	Eselon I	Tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data perusahaan	Dit. Pengendalian PPI
		- Laporan QoS layanan telephony pada penyelenggara jaringan bergerak seluler, sambungan internasional, sambungan jarak jauh, dan jaringan tetap lokal (circuit switched)	Rahasia	Eselon I	Tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data perusahaan	Dit. Pengendalian PPI

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PI.05.03	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi - LKO (Laporan Kinerja Operasi) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi - Laporan 5 tahunan penyelenggara jasa telekomunikasi	Rahasia	Eselon I	Tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data perusahaan	Dit. Pengendalian PPI
	PI.05.04	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran - instrumen monev	rahasia	Eselon II	tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data perusahaan / pribadi	Dit. Pengendalian PPI
		- Laporan pelaksanaan monev	Terbatas	Eselon I	tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data perusahaan / pribadi	Dit. Pengendalian PPI
	PI.05.05	Pencegahan dan Penertiban - Laporan Pencegahan Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Terbatas	Eselon I	tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data perusahaan / pribadi	Dit. Pengendalian PPI
		- Laporan Penertiban Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Terbatas	Eselon I	tertutup	Terdapat data rencana dan hasil penertiban dan penyidikan	Dit. Pengendalian PPI
		- Laporan Pencapaian BHP (Biaya Hak Penyelenggaraan) Telekomunikasi	Terbatas	Eselon I	tertutup	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia data perusahaan / pribadi	Dit. Pengendalian PPI

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	
3.	AI	APLIKASI INFORMATIKA						
	AI.01	Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan						
	AI.01.01	Layanan Infrastruktur dan Teknologi Interopabilitas Pemerintahan						
		- Dokumen Pendukung Data Center	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	
		- Implementasi Jaringan intra Pemerintah (Private Network Security / PNS BOX)	Biasa	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat khusus instansi pemerintah	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	
		- Penyusunan Blue print Intra Government	Biasa	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat khusus instansi pemerintah	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	
		- Laporan Kegiatan Penyusunan Blue Print Intra Government	Biasa	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat khusus instansi pemerintah	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	
		- Laporan Penyusunan Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemerintah Bidang kominfo (NSPK)	Biasa	Eselon IV	Terbatas	Informasi bersifat khusus instansi pemerintah	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	
	AI.01.02	Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Daerah						
		- Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan kebijakan terkait dengan pembinaan dan Pengembangan Aplikasi layanan di Pemerintah daerah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	
		- Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendaftaran dan Perubahan Data dan Nama Domain.go.id dan desa.id	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Khusus yang memiliki Akun	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	
		- Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Layanan di Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	
		-Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Layanan Pemerintahan di Pemerintah Daerah *Smartcity	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	AI.01.03	Layanan Aplikasi informatika Politik, Hukum, dan Keamanan					
		- Regulasi dan Pedoman Standar Interoperabilitas dan interkoneksi sistem elektronik pemerintah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
		- Sosialisasi dan Bimtek Interoperabilitas dan interkoneksi sistem elektronik pemerintah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
		- Pendampingan teknis dan supervisi penerapan interoperabilitas dan interkoneksi sistem elektronik pemerintah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
		- Pengelolaan layanan interoperabilitas dan interkoneksi sistem elektronik antar badan pemerintah untuk berbagi pakai data	Rahasia	Eselon IV	Terbatas	Hanya dapat diakses yang mempunyai akun	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
		- Penerapan interoperabilitas dan interkoneksi sistem elektronik pemerintah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
	AI.01.04	Layanan Aplikasi Informatika Kemaritiman dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan					
		- Penguatan Manajemen TIK	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
		- Asesmen kebutuhan infrastruktur dan Aplikasi TIK	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
		- e-Office	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Khusus yang memiliki Akun	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
		- mail.go.id	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Khusus yang memiliki Akun	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
		- E-Voting	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	Khusus yang memiliki Akun	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
	AI.01.05	Layanan Aplikasi Informatika Perekonomian					
		- Perizinan Online Terintegrasi : OSS, SiCantik, Aplikasi Pemda	Rahasia	Eselon III	Terbatas	Apabila perangkat lunak dikuasai oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
		- Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Layanan Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara	Rahasia	Eselon III	Terbatas	Apabila perangkat lunak dikuasai oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
		- Pengelolaan Layanan Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara	Rahasia	Eselon III	Terbatas	Apabila perangkat lunak dikuasai oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
		- Pengelolaan Aplikasi Cerdas Terpadu layanan untuk public (si-CANTIK)	Rahasia	Eselon III	Terbatas	Apabila perangkat lunak dikuasai oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan	Dir. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
	AI.02	Tata Kelola Aplikasi Informatika					
	AI.02.01	Tata Kelola Sistem elektronik dan Ekonomi Digital					
		- Fasilitasi Pengembangan Digital Economy	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dir. Tata Kelola Aplikasi Informatika
		- Panduan SOP Prinsip Kehati-hatian	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dir. Tata Kelola Aplikasi Informatika

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
		- Sosialisasi klasifikasi Bahan baku lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 63122	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dir. Tata Kelola Aplikasi Informatika
		- Layanan Aplikasi Informatika yang terintegrasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dir. Tata Kelola Aplikasi Informatika
	AI.02.02	Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan				-	
		- Maintenance Sistem layanan Aptika Terintegrasi	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	Dir. Tata Kelola Aplikasi Informatika
		- Sosialisasi Layanan Aptika Terintegrasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dir. Tata Kelola Aplikasi Informatika
		- Operasi layanan Aptika Terintegrasi	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	Dir. Tata Kelola Aplikasi Informatika
	AI.02.03	Tata Kelola Perlindungan data Pribadi					
		- layanan Pengaktifan Domain .id	Terbatas	Eselon IV	Tertutup	Informasi merupakan rahasia perusahaan	Dir. Tata Kelola Aplikasi Informatika
		- Monev dan Pemetaan Layanan Domain .id	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dir. Tata Kelola Aplikasi Informatika
		- Pelaksanaan dan Pendampingan dan Edukasi Pemanfaatan Domain .id	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dir. Tata Kelola Aplikasi Informatika
	AI.02.04	Tata Kelola Sertifikasi elektronik	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Dir. Tata Kelola Aplikasi Informatika
		- Layanan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik					
		- Bimtek layanan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik					
		- Sosialisasi layanan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik					
	AI.03	Pemberdayaan Informatika					
	AI.03.01	Literasi Digital				-	
		- Edukasi Literasi Digital bagi Masyarakat	Biasa	Eselon IV	terbuka	-	Direktorat Informatika
		- Buku Digital terkait literasi Digital					
		- Festival Literasi Digital (workshop, Seminar, diskusi, Dialog)					
		- Laporan Kegiatan					
		- TOR					

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	AI.03.02	Pemberdayaan komunitas TIK - Pemberdayaan pandu Digital - Laporan - TOR	Biasa	Eselon IV	terbuka	-	Direktorat Informatika
	AI.03.03	Pemberdayaan Kapasitas TIK - Fasilitasi Republic of Internet of Things (RIoT) untuk mendukung 1000 Digital Technopreneur - Fasilitasi Penyelenggaraan AICTA - Seleksi Nasional Karya TIK - Laporan - TOR	Biasa	Eselon IV	terbuka	-	Direktorat Informatika
	AI.03.04	Pemberdayaan Kreativitas TIK - Penjaringan dan Pelatihan Masyarakat untuk Digital Technopreneur - Pelatihan SMK Coding untuk mendukung 1000 Digital Technopreneur - Laporan - TOR	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Informatika
	AI.04	Ekonomi Digital					
	AI.04.01	Pengembangan Ekonomi Digital pendidikan dan kesehatan - Kegiatan Sasaran Strategis bidang pendidikan dan kesehatan - Laporan hasil kegiatan Pengembangan Ekonomi Digital pendidikan dan kesehatan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Ekonomi Digital

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	AI.04.02	Pengembangan Ekonomi Digital Pertanian dan Perikanan - Kegiatan Sasaran Strategis bidang pertanian dan perikanan - Fasilitasi program Pertanian dan Perikanan Go Online - Sosialisasi program Petani dan Perikanan - Laporan Kegiatan program Pertanian dan Perikanan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Ekonomi Digital
	AI.04.03	Pengembangan Ekonomi Digital Pariwisata, transportasi dan Perdagangan - Kegiatan Sasaran Strategis bidang pariwisata, transportasi dan perdagangan - Fasilitasi program pariwisata, transportasi dan Perdagangan - Sosialisasi program pariwisata, transportasi dan perdagangan - Laporan Kegiatan program pariwisata, transportasi dan perdagangan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Ekonomi Digital
	AI.04.04	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital - Ajang promosi kreatifitas TIK ekonomi digital - Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital - Fasilitasi program Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital - Sosialisasi program Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital - Laporan Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Ekonomi Digital

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	AI.05	Pengendalian Aplikasi Informatika					
	AI.05.01	Sistem Elektronik, Ekonomi dan Perlindungan Data Pribadi					Direktorat Pengendalian Aplikasi informatika
		- Pengawasan terhadap Sistem Elektronik dan Ekonomi Digital	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	
		- Tersusunnya Tool Assessment Perlindungan Data Pribadi	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	
		- Laporan Kegiatan	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	
		-TOR	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	
	AI.05.02	Pengendalian Konten Internet - Jumlah situs internet bermuatan negatif yang tertangani - Monitoring pemblokiran konten internet bermuatan negatif - Sistem Pemblokiran Konten Negatif - Laporan Kegiatan - TOR	Rahasia	Eselon IV	Terbatas	-	Direktorat Pengendalian Aplikasi informatika
	AI.05.03	Pengendalian Penyelenggara Sertifikasi Elektronik - Terselenggaranya Ekosistem Pendukung PSrE - Tersedianya PSrE Induk yang memenuhi Standar - Standard Fasilitas Peralatan PSrE - Dokumen 27001 PSrE Induk - Sertifikasi Elektronik PSrE Induk - Penyusunan Standar Interoperabilitas PSrE Induk - Laporan Kegiatan - TOR	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Pengendalian Aplikasi informatika

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	AI.05.04	Penyidikan dan Penindakan				-	
		- Penyelenggaraan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Keamanan Informasi: - Berita Acara Penyidikan Keamanan Informasi	Rahasia	Eselon IV	Tertutup	Hanya untuk pihak yang terkait	Direktorat Pengendalian Aplikasi informatika
		- Sosialisasi Keamanan Informasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Pengendalian Aplikasi informatika
		- Laporan Kegiatan				-	Direktorat Pengendalian Aplikasi informatika
		- TOR				-	Direktorat Pengendalian Aplikasi informatika
4.	IK	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
	IK.01	Komunikasi Publik					
	IK.01.01	Tata Kelola Komunikasi Publik					
		- Pengembangan Kebijakan dan Kapasitas SDM Bidang Penyelenggaraan Urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Direktorat Pengelolaan Media Publik, Direktorat Kemitraan Komunikasi, Direktorat Layanan Informasi Internasional, Museum Penerangan, Monumen Pers Nasional
		- Penatalaksanaan <i>Government Public Relation</i> (GPR)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Komunikasi Publik

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	IK.01.02	Layanan Komunikasi Publik - Strategi Komunikasi Percepatan Implementasi Kebijakan Pemerintah - Pelaksanaan Kebijakan Komunikasi Bidang Keterbukaan Informasi Publik - FKPPID (Forum Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	- - -	Direktorat Komunikasi Publik
	IK.01.03	Pembinaan Profesi Komunikasi Publik	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Komunikasi Publik
	IK.02	Pengolahan dan Penyediaan Informasi					
	IK.02.01	Pengolahan Isu Publik - Analisis Konten Media - <i>Government Public Relation (GPR) Report</i> - Rapat Koordinasi bidang Perekonomian, Maritim, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan - Monitoring Isu Publik	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi
	IK.02.02	Pengolahan Informasi - Pengolahan data informasi publik sektoral, Videografis dan Infografis	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
		- Sistem Informasi Komunikasi Publik	Terbatas	Eselon IV	Terbatas	-	Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Direktorat Pengelolaan Media Publik, Direktorat Kemitraan Komunikasi, Direktorat Layanan Informasi Internasional
		- Database Informasi Publik (Nasional, Sektoral, Regional)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi
		- Kerjasama dalam pengolahan informasi dengan Kementerian / Lembaga/ Daerah dan Perguruan Tinggi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi
	IK.02.03	Penyediaan Informasi - Penyusunan paket Informasi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi
		- Kerjasama penyediaan informasi publik dengan Kementerian / Lembaga / Daerah dan Perguruan Tinggi	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Direktorat Pengelolaan Media Publik, Direktorat Kemitraan Komunikasi, Direktorat Layanan Informasi Internasional

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	IK.03	Pengelolaan Media Publik					
		Tata Kelola Penerbitan Jurnal	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Pengelolaan Media Publik
		Tata Kelola Pelaksanaan Advertorial	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Pengelolaan Media Publik
		- Tata Kelola PSO Bidang Pers LKBN ANTARA	Terbatas	Eselon III	Tertutup	-	Direktorat Pengelolaan Media Publik
	IK.03.02	Media Online - Tata Kelola Media Online (Portal Berita) - Tata Kelola Media Center	Biasa	Eselon III	Terbuka	-	Direktorat Pengelolaan Media Publik
	IK.03.03	Media Luar Ruang dan Audio Visual					
		- Tata Kelola Dialog Interaktif di media TV, Radio, dll	Biasa	Eselon III	Terbuka	-	Direktorat Pengelolaan Media Publik
		- Tata Kelola Forum Diskusi Publik	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Pengelolaan Media Publik
		- Tata Kelola PSA (Public Service Announcement)	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Pengelolaan Media Publik
		- Tata Kelola Produksi Audio Visual	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Pengelolaan Media Publik
		- Tata Kelola Baliho/Spanduk	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Pengelolaan Media Publik
		- Tata Kelola Kendaraan Sarana Informasi dan Komunikasi Publik	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Pengelolaan Media Publik
		- Tata Kelola Pertunjukan Rakyat dan Media Tradisional	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Pengelolaan Media Publik

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	IK.04	Kemitraan Komunikasi					
	IK.04.01	Kemitraan Pemerintah, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah - Koordinasi Kehumasan Pemerintah - Pengelolaan Kehumasan Pemerintah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Kemitraan Komunikasi
	IK.04.02	Kemitraan Lembaga Media - Pemberdayaan Literasi Media - Pemberdayaan Media Komunitas	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Kemitraan Komunikasi
	IK.04.03	Kemitraan Lembaga Komunikasi Sosial - Forum Komunikasi Media Tradisional - Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Kemitraan Komunikasi
	IK.05	Layanan Informasi Internasional					
	IK.05.01	Layanan Informasi Media Internasional - Dialog Interaktif terkait Media Asing - Kunjungan Jurnalistik terkait Media Asing - Chief Editor Meeting	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Layanan Informasi Internasional
	IK.05.02	Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing Dan Lembaga Internasional - <i>Event</i> Internasional - Pertukaran kelompok informasi Internasional - Sidang dengan Lembaga Internasional	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Layanan Informasi Internasional
	IK.05.03	Layanan Informasi Masyarakat Internasional	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Direktorat Layanan Informasi Internasional

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Tingkat Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	IK.06	Museum Penerangan dan Monumen Pers					
	IK.06.01	Penataan Koleksi Benda-Benda Bersejarah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Museum Penerangan dan Monumen Pers Nasional
	IK.06.02	Penambahan Koleksi Benda-Benda Bersejarah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Museum Penerangan dan Monumen Pers Nasional
	IK.06.03	Pelestarian Koleksi Benda-Benda Bersejarah	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Museum Penerangan dan Monumen Pers Nasional
	IK.06.04	Promosi Museum Penerangan dan Monumen Pers	Biasa	Eselon IV	Terbuka	-	Museum Penerangan dan Monumen Pers Nasional

a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

FARIDA DWI CAHYARINI